

# ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI KARANG JAHE DI KABUPATEN REMBANG

Oleh:

Fitri Handayani, Hardi Warsono

Departemen Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Tourism development aims to increase local revenue. One of the areas that conduct tourism development activities are Punjulharjo village. The potential Punjulharjo village is Karang Jahe beach that has its own uniqueness compared to other beaches in Rembang, therefore the development of tourism involves the role of stakeholders, including governments, local communities and the private sector. The purpose of this study to identify and analyze the role of stakeholders in developing the tourism Karang Jahe beach, the factors that inhibit the role of stakeholders in an effort to developing the tourism of Karang Jahe beach, and formulate efforts to solve the inhibit factors of stakeholders' role in developing the tourism of Karang Jahe beach in rembang district. The method is used qualitative descriptive. The results shows that tourism development Karang Jahe beach involves the role of Dinbudparpora, local communities, and businessmen. The roles ran by each of the stakeholders include policy creator, coordinators, facilitators, implementers and accelerator. The role of stakeholders in tourism development more emphasis on the role of facilitator in physical form. Factors that inhibit the role of stakeholders in tourism development of Karang Jahe Beach are limited land, limited budgets, limited human resources, mindset, regulatory, promotional activities, and cooperation among stakeholders. Efforts are being made to overcome the inhibit factors, namely make cooperation between the managers of Karang Jahe Beach with landowners, build the tourism awareness through the tourism awareness group, and empower villagers to utilize the waste into commercial product, sanctions are regulated in the village in terms of tourism business establishment, improvement Dinbudparpora website related to promotional activities attractions Karang Jahe Beach, as well as the need to do a binding cooperation between stakeholders support through a memorandum of agreement on cooperation.*

**Keywords:** *Analysis of the role, Cooperation, Development of tourism*

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan potensi sumber daya alam, adat istiadat, bahasa dan perkembangan intelektual. Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya yang berlimpah tentu berpotensi untuk dijadikan objek wisata

yang menarik wisatawan. Hal tersebut menjadi tugas pemerintah untuk membangun dan mengembangkan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*), maka pengembangan pariwisata harus dilakukan dalam kesatuan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan

lainnya (Andi : 2004). Selain itu, pengembangan pariwisata secara optimal mampu memacu pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah, seperti tersedianya lapangan pekerjaan, meningkatnya taraf hidup dan aktifnya industri-industri lain. Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan Kabupaten Rembang memiliki kewenangan dalam melakukan pengembangan objek wisata di daerahnya salah satunya Pantai Karang Jahe. Pantai Karang Jahe merupakan wisata pantai pasir putih yang memanjang sekitar 1 km yang terletak di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Pantai Karang Jahe memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya di Kabupaten Rembang antara lain banyaknya serpihan karang yang ditemukan di bibir pantai, Pulau Karang dengan bentuk menyerupai Jahe, pasir putih yang bersih dan ribuan pohon cemara. Keunikan tersebut menjadikan Pantai Karang Jahe populer di kalangan wisatawan. Beragam kegiatan yang dapat dinikmati wisatawan di objek wisata Pantai Karang Jahe antara lain, motor ATV, kapal karet dan perahu menuju Pulau Karang. Perkembangan pariwisata tidak lepas dari peran *stakeholders* untuk berperan aktif dalam pengembangan objek wisata termasuk wisata bahari yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Rahim, 2012:1). Pihak Badan Pengelola Pantai Karang Jahe (BP KJB) telah melakukan upaya dalam mengembangkan objek wisata Pantai Karang Jahe yaitu melakukan pelebaran jalan menuju objek wisata, perluasan area parkir, pembangunan MCK, penyediaan kios-kios makanan, dan area permainan. Akan tetapi, masih ditemukannya berbagai permasalahan yang menjadi hambatan pihak BP KJB dalam menjalankan perannya. Sarana prasarana yang tersedia di objek wisata belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik seperti area permainan yang terbengkalai, akses jalan menuju objek wisata masih berupa batu dan tanah, dan kurangnya area parkir saat hari libur. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga selaku OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah salah satunya di bidang pariwisata, telah melakukan pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe yaitu pemberian gazebo dan pembangunan kios. Kios-kios yang telah didirikan

Dinbudparpora belum dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Masyarakat desa lebih memilih untuk membangun kios sendiri di area bibir pantai. Banyaknya kios yang berdiri tanpa aturan tersebut membuat kondisi pantai menjadi kurang tertata rapi. Oleh karena itu, diperlukannya kemitraan antar stakeholders yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis stakeholders dengan memetakan stakeholders berdasarkan pengaruh dan kepentingannya, menguraikan peran masing-masing stakeholders dalam usaha pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi para stakeholders dalam usaha pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang.

## B. TEORI

### *Stakeholders*

*Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok (Maryono et al.2005) dalam penelitian (Yosevita:25), antara lain:

#### a. *Stakeholders* primer

*Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai *stakeholder* primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan.

#### b. *Stakeholders* kunci

*Stakeholder* kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini *stakeholders* kunci adalah *stakeholders* yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang.

#### c. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

*Stakeholders* pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders*

pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. *stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Tahap pertama dalam menganalisis *stakeholders* adalah menetapkan “pengaruh” dan “kepentingan” (Reed *et al.*, 2009; Thompson, 2011; Gardner *et al.*, 1986) dalam penelitian (Kadir Wakka : 10) :

- a. Subyek (*Subjects*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
- b. Pemain Kunci (*Key Players*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. Pengikut Lain (*Crowd*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*Contest setters*). *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki pengaruh yang tinggi

#### **Peran Stakeholders**

Menurut Nugroho (2014, h.16-17) dalam penelitian Ali dkk, *stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

- a. *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
- c. Fasilitator yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. Implementer yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

#### **Kemitraan**

Menurut Sulistyani dalam (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5), kemitraan dalam perspektif etimologis diadaptasi dari kata *Partnership*. *Partnership* adalah kerjasama yang

dilakukan antar individu atau kelompok yang memiliki persamaan tujuan.

Sulistiyani (2004:130-131) dalam penelitian (Imelda:Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2, Nomor 1.Hlm 3), diilhami dari fenomena biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut:

- a. *Pseudo partnership* atau kemitraan merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya.
- b. Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.
- c. Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.

#### **C. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Penentuan lokasi berdasarkan letak objek wisata yaitu Pantai Karang Jahe (Karang Jahe Beach). Pemilihan informan didasarkan pada teknik *purposive sampling* yaitu teknik pemilihan informan untuk mendapatkan sumber data berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti. Selain itu, didukung dengan menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu apabila informan belum memberikan data yang lengkap, maka akan menggunakan informan-informan lain sehingga informan semakin banyak dan informasi akan semakin lengkap. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan kunci diantaranya kepala dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Rembang, Ketua Badan Usaha Milik Desa Punjulharjo (Bumdes), Badan Pengelola Pantai Karang Jahe (BP KJB), Ketua Karang Taruna Desa Punjulharjo, Wisatawan, dan pihak swasta. Jenis data yang diperoleh

dalam penelitian ini berupa kata-kata, dokumen dan foto. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi lapangan, wawancara dengan para informan dan dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer berupa buku, internet, dokumen atau arsip. Teknik analisis data di lapangan menggunakan model Miles *and* Huberman (Sugiyono, 2009 : 247) terdiri dari mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan data.

## **PEMBAHASAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah antara lain daerah pantai dengan luas kurang lebih 63,5 km, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Letak geografis inilah yang menjadikan Kabupaten Rembang memiliki banyak potensi pariwisata. Pariwisata di Kabupaten Rembang yang saat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar Kabupaten Rembang adalah objek wisata pantai Karang Jahe. Pantai Karang Jahe terletak di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Jumlah penduduk Desa Punjulharjo 1.545 jiwa dan 412 KK dengan rata-rata penduduk bermata pencaharian sebagai petani/tambak dengan kepemilikan tanah rata-rata 0.450 ha.

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Desa Punjulharjo melalui Badan Pengelola Pantai Karang Jahe (BP KJB).

### **B. HASIL PENELITIAN**

#### **Identifikasi *stakeholders***

Maryono (2005) *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe terdiri dari *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholders* primer meliputi Warga Desa Punjulharjo dan masyarakat. Kegiatan pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe menimbulkan dampak positif antara lain : 1) Terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga Desa Punjulharjo. Mayoritas warga membuka warung makan, pemuda Desa Punjulharjo mendapatkan pekerjaan sebagai petugas parkir, petugas karcis,

petugas kebersihan dan penyewaan wahana perainan. 2) Adanya interaksi antara warga dengan wisatawan, sehingga terjadinya pertukaran informasi dan budaya. 3) Keterlibatan warga dalam kegiatan kepariwisataan seperti mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh OPD Kabupaten Rembang serta partisipasi dalam kegiatan kelompok sadar wisata.

*Stakeholders* kunci meliputi Badan Pengelola Pantai Karang Jahe (BP KJB) yang merupakan sub unit dari Bumdes dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai unsur perangkat daerah yaitu memiliki tugas salah satunya dalam mengurus bidang pariwisata.

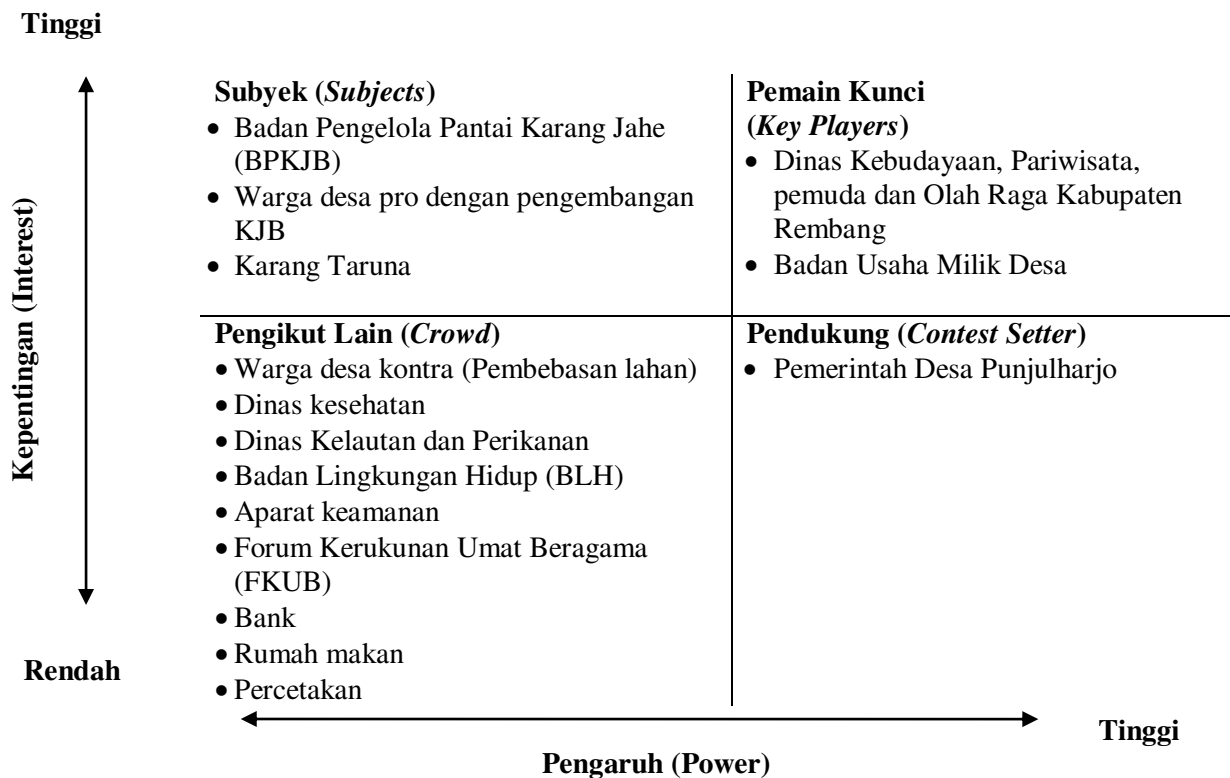
*Stakeholders* sekunder meliputi pihak eksternal antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, POLRES, Forum Kerukunan Umat Beragama, komunitas pemuda, rumah makan Pringsewu dan percetakan Selecta Grafika. Mereka memiliki kepedulian untuk memajukan dan mempromosikan Pantai Karang Jahe.

#### **Identifikasi Peran *Stakeholder***

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peran (Soekamto, 2004). Pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe dipengaruhi oleh peran *stakeholder* internal yaitu *stakeholder* primer dan kunci yang memiliki peran sebagai pelaksana, koordinator, implementator, pendamping dan fasilitator. Sedangkan, *stakeholders* eksternal mencakup *stakeholders* sekunder atau pendukung yang berperan sebagai fasilitator.

#### **Pemetaan *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe**

*Stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dilakukannya pemetaan *stakeholders* berdasarkan “pengaruh” dan “kepentingan” dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Warga desa sebagai *stakeholder* primer dikategorikan sebagai *subject* dan *crowd*. Warga desa dengan tingkat kepentingan tinggi dengan pengaruh



Gambar 1 Pemetaan *Stakeholders* Berdasarkan Pengaruh dan Kepentingan dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe

rendah (*subject*) merupakan warga desa yang pro dengan pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe. Badan Pengelola Pantai Karang Jahe (BP KJB) selaku *stakeholder* kunci yang bertugas dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe memiliki tingkat kepentingan tinggi dengan pengaruh rendah. BP KJB seharusnya memiliki pengaruh yang tinggi dalam kaitan mengatur pelaku usaha di objek wisata. Akan tetapi, BP KJB adalah sub unit dari Bumdes dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga BP KJB tidak memiliki kekuasaan secara tinggi dalam mengatur Pantai Karang Jahe. BP KJB hanya melakukan tugasnya dengan berpedoman pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Desa Punjulharjo dan Bumdes.

Dinbudparpora dan Bumdes memiliki kepentingan dan kekuasaan yang tinggi (*Key Players*) dalam pembuatan peraturan terkait dengan pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe.

Pemerintah Desa Punjulharjo memiliki pengaruh yang tinggi dengan tingkat kepedulian rendah (*Contest Setter*), artinya pemerintahan desa memiliki kekuasaan dalam pembuatan peraturan tentang pengelolaan objek wisata di desa. Akan tetapi, pemerintahan desa Punjulharjo hanya berpedoman kepada peraturan daerah.

Warga desa dengan tingkat kepedulian dan pengaruh yang rendah adalah mereka yang masih mempertahankan lahannya untuk pengembangan objek wisata. Sedangkan, Dinas kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Lingkungan Hidup, aparat keamanan, Bank dan LSM merupakan *stakeholders* sekunder masuk dalam kategori *Crowd*. Akan tetapi, tupoksi dan program lembaga tersebut tidak berkaitan langsung dengan program dan kegiatan dalam pengembangan objek wisata pantai Karang Jahe, maka mereka tidak terlalu memperhatikan dalam

memberikan pengaruh dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe.

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan stakeholders selanjutnya melakukan identifikasi peran stakeholders yang telah dilakukan dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe.

Nugroho (2014) mengemukakan peran *stakeholder* dalam program pengembangan pariwisata meliputi: 1) *Policy creator*, 2) Koordinator, 3) Fasilitator, 4) Implementer, 5) Akselerator, yang disajikan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 Hasil Identifikasi dan Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Kabupaten Rembang

<i>Stakeholder Primer</i>	Peranan/posisi	Kegiatan Terkait Peran	Analisis Penilaian
Warga Desa	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lahan untuk pengembangan area wisata.</li> <li>Menyediakan akomodasi pariwisata.</li> <li>Terlibat dalam kegiatan pengembangan objek wisata sebagai pelaku usaha ekowisata.</li> <li>Menetapkan dan memungut retribusi kepada pelaku usaha wisata atas pemanfaatan fasilitas yang tersedia.</li> </ol>	Warga desa sebagai pelaksana dalam pengembangan objek wisata memberikan pelayanan yang prima dengan menyediakan tenaga kerja dan penyediaan fasilitas kepariwisataan. Hambatan BP KJB adalah dalam pengembangan area parkir wisata dikarenakan adanya sifat warga yang masih mempertahankan lahannya, masih adanya pelaku usaha yang tidak terkena retribusi karena status usahanya yang ilegal. Pelaku usaha ilegal tersebut dikarenakan tidak melakukan perijinan ke BP KJB.
<i>Stakeholder Kunci</i>	Peranan/posisi	Kegiatan Terkait Peran	Analisis Penilaian
BP KJB	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain yaitu warga, pemerintahan desa, Bumdes, dan pemilik usaha di objek wisata.</li> <li>Koordinasi melalui rapat dengan pelaku usaha seperti rapat paguyuban warung, paguyuban wahana permainan yang dilakukan setiap bulan.</li> </ol>	BP KJB dalam melakukan koordinasi sangat tergantung pada peran warga sebagai pelaksana. Hambatan BP KJB dalam melakukan koordinasi yaitu sulitnya komunikasi dengan warga desa terutama dalam pembangunan warung makan. Hambatan kedua, koordinasi yang dilakukan antara BP KJB dengan pelaku usaha tidak disertai dengan kesepakatan sehingga tidak ada sanksi yang mengikat.
	Implementator	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang diadakan oleh Dinbudparpora.</li> <li>Memberikan usulan kepada pemerintah daerah terkait</li> </ol>	BP KJB sebagai implementator/pelaksana tergantung pada kesediaan kelompok sadar wisata dalam mengikuti pemberdayaan wisata dan respon dari pemerintah atas usulan yang diajukan oleh BP KJB. Hambatan BP KJB sebagai pelaksanaan yaitu usulan yang diajukan kepada

		pengembangan objek wisata berupa proposal.	pemerintah masih tahap proses, sehingga peran BP KJB sebagai pelaksanaan terhambat.
	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan segala fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata</li> <li>2. Penyediaan kotak saran dan kontak pengaduan untuk wisatawan, dan pos informasi.</li> <li>3. Pembangunan sarana prasarana objek wisata antara lain: pelebaran jalan menuju objek wisata, pembuatan jembatan, perbaikan gapura, pembangunan MCK, dan tempat parkir.</li> <li>4. Penyediaan tenaga kerja meliputi petugas karcis, petugas parkir, petugas kebersihan, penjaga area objek wisata dan penjaga MCK</li> <li>5. Pemberian kontribusi dalam pendanaan yang dialokasikan untuk kepentingan Desa Punjulharjo</li> </ol>	<p>Peran BP KJB sebagai fasilitator yaitu penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan kepariwisataan. BP KJB belum bisa menyediakan akses jalan yang baik berupa pengaspalan jalan, penyediaan area parkir saat hari libur dan penyediaan tenaga kerja tambahan ketika event atau hari libur. Hambatan-hambatan peran BP KJB sebagai fasilitator dikarenakan anggaran yang dimiliki masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan tersebut.</p>
DINBUD PARPORA	Koordinator	Melakukan rapat antar <i>stakeholder</i> terkait pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe guna mengevaluasi kegiatan yang telah terlaksana.	Dinbudparpora selaku koordinator tergantung pada partisipan warga desa Punjulharjo untuk terlibat dalam kegiatan evaluasi pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe.
	Implementator	Pemberdayaan terhadap kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan, pelestarian lingkungan pariwisata	Peran Dinbudparpora selaku pelaksana dalam melakukan pemberdayaan pokdarwis tergantung dengan kemauan pokdarwis yang ada di desa. Wujud pemberdayaan pokdarwis berupa studi banding desa wisata ke kota lain. Hambatan a peran Dinbudparpora ebagai pelaksana adalah anggaran dan sumber daya yang tersedia.

Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan informasi dan fasilitas Kepariwisata</li> <li>2. Meningkatkan sarana prasarana pendukung ekowisata</li> <li>3. Melakukan kegiatan promosi</li> </ol>	<p>Peran Dinbudparpora sebagai fasilitator di objek wisata Pantai Karang Jahe berupa pemberian gazebo 20 buah, pembangunan kios, penyediaan sarana prasaran pendukung seperti bangku hias, MCK, dan area permainan. Peran Dinbudparpora sebagai fasilitator tergantung dengan sikap masyarakat dan BP KJB dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan fasilitas yang diberikan. Hambatan yang terjadi sebagai fasilitator yaitu tidak tercapainya target jumlah gazebo, jumlah kios yang disediakan terbatas dan penyediaan informasi berupa promosi Pantai Karang Jahe belum dilakukan secara meluas baik melalui media cetak maupun elektronik.</p>
-------------	---	--

<b>StakeholderSe kunder</b>	<b>Peranan/ posisi</b>	<b>Kegiatan Terkait Peran</b>	<b>Analisis Penilaian</b>
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rembang	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi sadar wisata kepada warga dan wisatawan terkait upaya pelestarian lingkungan dan terumbu karang.</li> <li>2. Pemberian banner tentang pelestarian terumbu karang.</li> </ol>	<p>Dinlutkan melakukan perannya dalam memberikan sosialisasi tentang pelestarian lingkungan bergantung pada respon dan kesadaran masyarakat desa. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan perannya adalah tidak adanya kegiatan secara bertahap, sehingga tidak semua wisatawan dan masyarakat desa memiliki kesadaran akan pelestarian lingkungan.</p>
Dinas Kesehatan Kab. Rembang	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyuluhan kepada pelaku usaha makanan di objek wisata Pantai Karang Jahe.</li> <li>2. Pengadaan donor darah setiap bulannya.</li> </ol>	<p>Peran Dinas Kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang kebersihan makanan tergantung pada sikap pedagang makanan di objek wisata. Hambatan yang terjadi yaitu masih ditemuinya pedagang yang menjual makanan dengan kualitas makanan dan cara penyajian yang tidak sesuai dengan penyuluhan yang diberikan</p>
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Rembang	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan 6 buah tong sampah di objek wisata.</li> <li>2. Tong sampah terdiri dari sampah plastik, sampah daun dan sampah kertas</li> </ol>	<p>Peran BLH sebagai penyedia fasilitas pendukung objek wisata tergantung pada perilaku wisatawan, pelaku usaha, dan pengelola pantai. Hambatan peran BLH belum adanya sosialisasi yang dilakukan tentang cara membedakan sampah.</p>



Aparat Keamanan	Fasilitator	Kepolisian melakukan penjagaan objek wisata dan mengatur lalu lintas.	Peran aparat keamanan sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat. Peran aparat keamanan sangat bergantung pada masyarakat desa selaku tuan rumah dalam menyediakan polisi wisata. Peran aparat keamanan sebagai fasilitator belum maksimal karena penjagaan hanya dilakukan pada saat event dan hari libur.
Pihak luar	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melakukan kegiatan penanaman pohon cemara dengan warga desa untuk mencegah terjadinya abrasi.</li> <li>2. Pihak Bank melakukan bantuan berupa pembangunan kamar mandi, tempat ibadah dan papan petunjuk objek wisata</li> <li>3. Melakukan kegiatan promosi terintegritas dengan badan pengelola pantai Karang Jahe untuk mendongkrak wisatawan.</li> </ol>	Peran FKUB sebagai fasilitator bergantung pada kemaunan dan komitmen masyarakat Desa Punjulharjo dalam melakukan kegiatan penanaman dan pelestarian pohon Cemara. Peran pihak eksternal seperti komunitas Rembang, rumah makan dan percetakan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kegiatan promosi Pantai Karang Jahe perlu di dukung oleh pemerintah desa Punjulharjo selaku tuan rumah desa wisata Pantai Karang Jahe.

Peran *policy creator* dijalankan pemerintah daerah Kabupaten Rembang terkait peraturan pariwisata Kabupaten Rembang. Bupati selaku kepala daerah berperan sebagai fasilitator dan mengarahkan kepada para organisasi perangkat daerah salah satunya DINBUDPARPORA untuk mendukung pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe. Berdasarkan tabel diatas, bahwa masing-masing *stakeholders* lebih menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam bentuk fisik yaitu menyediakan sarana prasarana akan tetapi tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan khususnya untuk pelaku usaha objek wisata.

### **Jejaring Kerjasama Stakeholders**

Kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe bersifat sukarela. Berdasarkan pengkelompokan kemitraan

menurut Sulistani (2014) masuk dalam kategori kemitraan mutualistik. Kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, sehingga mencapai tujuan secara optimal. Kerjasama tersebut dilakukan para stakeholders antara lain:

- a. Pemerintahan Desa dengan Warga Desa Punjulharjo. Kerjasama berupa pengadaan sarana prasarana pariwisata antara lain warung makan, wahana permainan dan toko souvenir. Setiap warga yang mendirikan usaha diwajibkan melakukan perijinan kepada BP KJB dan membayar retribusi sesuai dengan jenis usahannya.
- b. Pemerintahan Desa dengan Dinbudparpora. Perijinan dari pemerintah daerah Kabupaten Rembang kepada warga Desa

Punjulharjo untuk mendirikan usaha dan mengelola

- c. Pantai Karang Jahe dengan pengawasan Dinbudparpora.
- d. Pemerintahan Desa dengan Aparatur Keamanan. BP KJB melakukan kerjasama dengan kepolisian untuk membantu mengamankan objek wisata setiap ada *event-event* dan hari libur. Timbal balik atas kerjasama tersebut, BP KJB memberikan kompensasi kepada polisi wisata berupa konsumsi dan transport
- e. Pemerintahan Desa dengan pihak luar. Kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam penanaman pohon cemara disepanjang bibir pantai. BP KJB melakukan kerjasama dengan pihak Bank, rumah makan, percetakan dan para komunitas. Bentuk kerjasama tersebut berupa perijinan dari pihak luar untuk melakukan kegiatan promosi usahanya kepada wisatawan Pantai Karang Jahe.

#### **Faktor Penghambat Peran Stakeholders dalam Kegiatan Pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang**

- a. Terbatasnya Lahan  
Terbatasnya lahan untuk area parkir disebabkan beberapa pemilik lahan yang masih mempertahankan lahannya. Sehingga, area parkir diperluas hingga bibir pantai dan menimbulkan dampak negatif yaitu merusak pasir pantai, merusak keindahan pantai dan mengganggu kenyamanan wisatawan.
- b. Terbatasnya Anggaran  
Kegiatan pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe menggunakan anggaran dari hasil pendapatan objek wisata. anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembebasan lahan, sehingga belum adanya anggaran untuk pengaspalan jalan.
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan pariwisata. Semenjak dijadikan objek wisata bahari, mendorong Desa Punjulharjo untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten. Salah satunya penyediaan pemandu wisata, mengingat wisatawan yang datang terdiri dari wisatawan lokal dan asing. Namun, sumber daya manusia yang ada tidak memiliki kemampuan berbahasa asing dan

pengetahuan tentang wisata bahari, sehingga wisatawan asing seperti India membawa *guide* sendiri. Selain itu, pihak Dinbudparpora bidang pariwisata memiliki 8 pegawai. Setiap pegawai memiliki bagian tugasnya masing-masing, akan tetapi jumlah tersebut tidak seimbang dengan program-program pariwisata yang dilakukan oleh bidang pariwisata

- d. Pola Pikir  
Warga Desa Punjulharjo mayoritas adalah pedagang makanan di objek wisatadengan menu yang sama. Warga desa berfikir dengan berjualan makanan lebih menguntungkan daripada berjualan lainnya. Padahal komponen pariwisata tidak hanya berupa warung makan akan tetapi juga penyediaan *homestay*. Ketidaksiadanya *homestay* menjadi kesulitan bagi BP KJB untuk menerima wisatawan dari luar kota. Hal tersebut menandakan pola pikir yang dimiliki warga masih bersifat “ikut-ikutan”.
- e. Regulasi  
Belum ada regulasi dari pemerintah daerah tentang Bumdes terkait pengelolaan objek wisata di desa. sehingga, pemerintah desa membuat peraturan sendiri tentang tata tertib pedagang. Peraturan yang tidak mengikat tersebut, menjadikan warga mendirikan usahanya secara ilegal.
- f. Promosi Pariwisata yang Dilakukan Kurang Maksimal  
Promosi yang dilakukan Dinbudparpora berupa buku profil dinas yang didalamnya berisi tentang kebudayaan, objek wisata dan kepemudaan yang ada di Kabupaten Rembang, duta wisata (Mas Mbak Rembang). Penyebaran buku profil pariwisata hanya diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Rembang dan para pengunjung Dinbudparpora. Namun, peran Dinbudparpora dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata belum maksimal, terlihat dari website Dinbudparpora yang tidak bisa diakses oleh masyarakat.
- g. Kerjasama antar Stakeholders  
Kerjasama yang dilakukan para stakeholders dalam pengembangan objek wisata pantai Karang Jahe tidak disertai dengan perjanjian yang mengikat. Para *stakeholders* eksternal dapat melakukan penghentian bekerjasama

dengan pemerintah desa, sehingga menjadi kerugian pihak desa dalam mengelola objek wisata. penolakan adanya investor oleh pemerintah Desa Punjulharjo dikarenakan keinginan pihak desa untuk mengelola secara mandiri dan rasa takut warga desa menjadi tamu di rumah sendiri.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Stakeholders yang terlibat di dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe terdiri dari stakeholders primer, kunci dan sekunder. Badan pengelola pantai karang jahe (bp kjb) dan Dinbudparpora merupakan stakeholders kunci yang memiliki peran penting dalam pengembangan objek wisata pantai karang jahe. Stakeholders sekunder meliputi Dinas kelautan dan perikanan, dinas kesehatan, badan lingkungan hidup, aparat keamanan dan pihak luar (swasta). Pola kerjasama *stakeholders* dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe bersifat sukarela dan “*give and take*” atau kemitraan mutualistik. Artinya, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan kegiatan kerjasama yang dilakukan.

Faktor-faktor yang menghambat para stakeholders dalam upaya mengembangkan objek wisata pantai karang jahe ialah lahan, anggaran, sumber daya manusia, pola pikir, regulasi, promosi pariwisata, dan kerjasama antar stakeholders

### **B. Saran**

Saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. BP KJB dapat melakukan kerjasama dengan pemilik lahan melalui pengarahannya tujuan dilakukannya pembebasan lahan. Pemilik lahan juga diikutsertakan dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe.
- b. Terbatasnya anggaran diatasi dengan kerjasama antara BP KJB dengan dinas pekerja umum untuk membantu pengaspalan jalan.
- c. Perlu dilakukannya penanaman akan sadar wisata oleh pegawai pariwisata melalui kegiatan kelompok sadar wisata setiap bulannya serta kunjungan objek wisata.
- d. Pemerintah desa melakukan pemberdayaan kepada warga desa untuk memanfaatkan limbah yang ada di objek wisata menjadi produk jual beli. Selain itu, mengajak warga

desa yang memiliki kesadaran wisata untuk studi banding ke desa-desa wisata lainnya. Tujuannya agar warga desa tidak hanya mendirikan usaha warung makan tetapi juga *homestay*

- e. Peraturan yang di buat pemerintah desa harus disertai dengan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera. Tindakan tersebut bertujuan untuk menertibkan usaha pariwisata dan menghindari adanya kecemburuan antar pemilik usaha.
- f. Promosi objek wisata melalui website memberikan informasi kepada masyarakat diluar kecamatan dan kabupaten Rembang. Untuk itu, segera dilakukannya perbaikan website DINBUDPARPORA sebagai bentuk promosi melalui media sosial.
- g. Kegiatan pengembangan objek wisata akan terus dilakukan dengan penyediaan fasilitas dengan inovasi-inovasi baru. Untuk itu, kerjasama para *stakeholders* disertai dengan nota kesepakatan kerjasama. Tujuan nota tersebut agar *stakeholders* pendukung tetap berperan dalam pengembangan objek wisata Pantai Karang Jahe. Pemerintah desa juga harus membuka kerjasama dengan pihak investor yang disertai dengan perjanjian. Kerjasama yang dilakukan harus disetujui oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: ISBN
- Damanik, Janianton dan Helmut F. Weber. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Hani, Handoko.2009. *Manajemen edisi 2* (cetakan ke-20). Yogyakarta: BPFE.
- Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Kusumanegara, Solahuddin.2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Gava media
- Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi

- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Diatra.2009.*Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono.2007.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung :Alfabeta
- Sugiyono.2008.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung :Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Profil Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang*. (2015).
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Jurnal:**
- Al Azhar, Muchtar Luthfi Malik, Imam Hardjanto dan Minto Hadi. “*Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara)*,” jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, Hal. 1048-1057
- Amalyah, Reski, Djahur Hamid dan Luchman Hakim.*Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona sebagai destinasi Wisata Bahari*.Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 37 No. 1 Agustus 2016
- Hardiansya, Gusti. *Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era pembangunan KPH di Kabupaten ketapang [pdf]*. Vol. 8, Nomor 3, Oktober 20012 hal: 186-194
- Heny Urmila Dewi, Made. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali [pdf]*. Kawistara, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013: 129-139
- Hadi, Agus Purbathin. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan [pdf]*.
- Mahfud, Ali Zuhri, Muhammad, Bambang Santoso Haryono dan Niken Lastiti Veri Anggraeni. *Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.12, Hal.2070-2076
- Melyanti, Imelda Merry. “*Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru kota Probolinggo*.” Jurnal kebijakan dan manajemen publik, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014
- Nadin.2008.*Pariwisata dan Pengembangan Sumber daya Manusia [jurnal]*
- Purnomo, Cahya.2008.*Efektifitas Strategi Pemasaran Produk Wisata Minat Khusus Gua Cerme, Imogoi, Bantul*.Jurnal Siasat Bisnis Vol. 12 No. 3, Desember 2008 Hal: 187-197
- Purwaningsih.2013. *Bab II Kajian Teori [pdf]*. eprints.uny.ac.id/18186/4/BAB%20II%2009.12.017%20Eti%20i.pdf .diakses 22 April 2017
- Pramudya, Akbar.2012.*Peran Pemerintah Daerah Jawa Tengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang Tahun 2003-2008*.skripsi.Universitas Diponegoro.
- Latupapua, Yosevita Th.2015. “*Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusele (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah*.” Jurnal Agroforestri X Nomor 1 ISSN : 1907-7556.
- Saputri, Febriana. 2014. *Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengoptimalkan Objek Wisata Cagar Budaya Bukit Kerang di Kabupaten Bintan [pdf]*.
- Sundawati, Leti dan Sanudin. *Analisis Pemangku Kepentingan dalam Upaya Pemulihan Ekosistem Daerah Tangkapan Air Danau Toba [pdf]*. Artikel ilmiah JMHT Vol. XV, (3):102-108, Desember 2009

Warsono, Hardi. *Networking dalam Intergovernmental Management*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik “Dialogue” JIAKP, Vol. 6, No. 1, Januari 2009:78-91 [jurnal] diakses 24 Mei 2016.

Wahid, Abdul.2015. *Peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata Pantai Manggar Kota Balikpapan* [ejournal] diakses 3 Januari 2016.

Oktavian, Ade.2006. “*Peran Stakeholders dalam Aksesibilitas Penyandang Cacat Pada Pilkada 2005 di Kota Semarang.*” skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Yudiyanti, Yeti dan Sugi Rahayu.*Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based tourism)*.Jurnal.Hlm 7

Rusmana, Nandang.*Sosiometri, Brainstorming, NGT, Delphi, dan Synectics*.pdf. file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.../SOSIOME TRI\_[Compatibility\_Mode].pdf

Wakka, Kadir.*Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol.3 No.1, April 2014 : 47-55

[http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/16/09/02/ocujrz328\\_wisata-ke-rembang-harus-ke-6-tempat-ini](http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/16/09/02/ocujrz328_wisata-ke-rembang-harus-ke-6-tempat-ini). Diakses 1 November 2016

Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat, tersedia:

[etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/96222/.../S1-2016-335825-introduction.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/96222/.../S1-2016-335825-introduction.pdf).

Diakses 21 April 2017

Fajar Sari, Bunga.2006.*Bentuk kerjasama (cooperation)Pada interaksi sosial warai [pdf]*. Tersedia

[http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2006/Artikel\\_10500062.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2006/Artikel_10500062.pdf) Diakses 23 April 2017

#### **Internet:**

Dedy Susilawati. *Republika* (Jum’at, 2 September 2016), tersedia: